



Analisis Implementasi Dan Dampak Pada Makanan Bergizi Gratis (MBG): Studi Pendekatan Transdisipliner

Harien Fidelya Ardhana ✉, Universitas Negeri Jakarta

Rini Riris Setyowati, Universitas Negeri Jakarta

Sujarwo, Universitas Negeri Jakarta

Desy Safitri, Universitas Negeri Jakarta

✉ fidelya203@gmail.com

Abstract: The implementation and impact of the Free Nutritious Food Program (MBG) was launched by the Indonesian government in 2025 to reduce stunting, malnutrition, and food inequality for 82.9 million people. This program has encountered various obstacles in its implementation in the field. The objective of this study is to analyze the implementation and evaluate the impact of the Free Nutritious Meals (MBG) program on nutritional status, student attendance, and concentration; and to recommend solutions to identified problems. Using a qualitative method, a literature review of 20 SINTA-accredited journal articles (2020-2025) was used. Analysis was carried out through data reduction, thematic classification, and synthesis based on the Miles model. The study results show that MBG improves student attendance, learning concentration, reduces stunting, and has a multiplier effect on the local economy through the involvement of MSMEs and farmers. However, major challenges include recurrent food poisoning, weak BGN supervision, complex bureaucracy, and regional inequality due to logistics and low legal literacy. This threatens SDGs 2 related to zero hunger and children's rights. The transdisciplinary discussion integrates legal, sociological, health, educational, and economic perspectives. Researchers recommend cross-sector coordination, local flexibility, transparency, nutrition education, and comprehensive evaluation for the sustainability of MBG.

Keywords: Free Nutritious Food, Transdisciplinary, Golden Generation 2045

Abstrak: Implementasi dan dampak Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dicanangkan pemerintah Indonesia pada 2025 untuk mengurangi stunting, malnutrisi, dan ketimpangan pangan bagi 82,9 juta jiwa. Program ini mengalami beragam kendala dalam implementasi di lapangan. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis implementasi dan mengevaluasi dampak program Makanan Bergizi Gratis (MBG) terhadap status gizi, kehadiran siswa, konsentrasi belajar; serta merekomendasikan solusi permasalahan. Menggunakan metode kualitatif studi pustaka terhadap 20 artikel jurnal terakreditasi SINTA (2020-2025). Analisis dilakukan melalui reduksi data, klasifikasi tematik, dan sintesis berdasarkan model Miles. Hasil studi menunjukkan MBG meningkatkan kehadiran siswa, konsentrasi belajar, penurunan stunting, serta efek multiplikator ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM dan petani. Namun, tantangan utama meliputi keracunan makanan berulang, lemah pengawasan Badan Gizi Nasional, birokrasi kompleks, dan ketimpangan regional akibat logistik serta literasi hukum rendah. Hal tersebut mengancam SDGs 2 berkaitan dengan tanpa kelaparan dan hak anak. Pembahasan transdisipliner mengintegrasikan perspektif hukum, sosiologi, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Peneliti merekomendasikan koordinasi lintas sektor, fleksibilitas lokal, transparansi, edukasi gizi, dan evaluasi komprehensif untuk keberlanjutan MBG.

Kata kunci: Makanan Bergizi Gratis, Transdisipliner, Generasi Emas 2045

Received 20 Desember 2025; **Accepted** 28 Mei 2026; **Published** 30 Mei 2026

Citation: Ardhana, H.F., Setyowati, R.R., Sujarwo, & Safitri, D. (2026). Analisis Implementasi Dan Dampak Pada Makanan Bergizi Gratis (MBG): Studi Pendekatan Transdisipliner. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 6 (02), 463-475.



Copyright ©2026 Jurnal Jendela Pendidikan

Published by CV. Jendela Edukasi Indonesia. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam mengurangi permasalahan stunting diwujudkan dalam bentuk Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Program ini diterapkan mulai dari anak sekolah, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui. Program ini dicanangkan dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung visi dalam mewujudkan Generasi Emas 2045. MBG diresmikan pada 6 Januari 2025 yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sesuai Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang pembentukan BGN. Makanan Bergizi didistribusikan pada saat siang hari secara gratis dengan pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Sasaran MBG dikhususkan bagi 82,9 juta penerima seperti siswa PAUD hingga SMA/SMK, santri, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program MBG mengeluarkan anggaran sebanyak Rp. 171 Triliun di periode 2025-2029 (Riyanto & Sinaga, 2025).

Implementasi MBG menghadapi berbagai masalah utama yaitu keracunan makanan yang berulang, lemahnya pengawasan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), serta kesenjangan antara kerangka hukum yang kuat dengan realitas di lapangan akibat keterbatasan sumber daya dan birokrasi kompleks. Hal ini mengancam hak anak atas pangan aman yang tertera pada UUD 1945 pasal 28H dan konvensi hak anak, menurunkan kepercayaan publik serta menghambat pencapaian target SDGs 2 terkait *Zero Hunger* (Kelaparan) (Riyanto & Sinaga, 2025). Program ini diluncurkan untuk mengurangi beberapa permasalahan terkait pangan dan kesehatan, namun dalam pelaksanaannya masih kurang efektif. Permasalahan tersebut menimbulkan banyak permasalahan lain yang didukung dengan rendahnya akuntabilitas pemerintah (administrasi, perdata dan pidana). Hal tersebut dipersulit dengan rendahnya tingkat literasi hukum, akses keadilan yang sulit, kendala logistik dalam penyediaan pangan lokal berkualitas juga kendala pendistribusian makanan di daerah pelosok. Penelitian ini akan menganalisis akar masalah dan usul solusi yang realistis demi kelangsungan program.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) terbukti membantu menurunkan angka stunting pada anak dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Efek jangka panjang program MBG perlu ditinjau lebih lanjut terutama mengenai keberlanjutan dana dan kualitas nutrisi (Khatimah *et al.*, 2025). Survei sentimen publik menunjukkan opini masyarakat yang terbelah karena masalah logistik dan kualitas makanan (Badan Gizi Nasional Indonesia, 2025). Jika MBG tidak melakukan perbaikan besar seperti peningkatan skill teknis, sangat memungkinkan jika MBG gagal dalam mencapai tujuan inklusif masyarakat Indonesia. Pendekatan transdisipliner memungkinkan sintesis antar disiplin seperti hukum kemasyarakatan, analisis wacana kritis, dan kebijakan publik untuk bisa mengatasi kompleksitas permasalahan MBG. Integrasi tersebut mampu mengidentifikasi akar masalah seperti birokrasi rumit dan literasi hukum rendah, sekaligus merancang solusi berkelanjutan. Studi kasus keracunan menjadi titik tolak untuk evaluasi dampak jangka panjang pada keadilan sosial dan perlindungan anak. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis implementasi dan mengevaluasi dampak program Makanan Bergizi Gratis (MBG) terhadap status gizi, kehadiran siswa, konsentrasi belajar; serta merekomendasikan solusi permasalahan.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka (*library research*) untuk mengumpulkan, membandingkan, serta mensintesis temuan dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dipilih harus relevan mengenai implementasi dan dampak Makanan Bergizi Gratis (MBG). Sumber data mencakup 20 artikel jurnal nasional yang terbit dalam rentang waktu 2020-2025 serta dipilih berdasarkan kriteria ketat seperti terindeks pada jurnal terakreditasi SINTA. Selain itu harus menggunakan pendekatan transdisipliner serta memiliki metodologi yang jelas untuk analisis komparatif. Analisis data dilakukan melalui tiga fase: (1) reduksi data dengan menyeleksi

artikel dan mengidentifikasi variabel kunci implementasi dan dampak MBG dari berbagai ilmu; (2) klasifikasi tematik melalui pengelompokkan temua berdasarkan tema serupa seperti implementasi dan dampak dalam sudut pandang hukum, sosiologi, psikologi, kesehatan, dll; (3) sintesis tematik untuk mengintegrasikan hasil, guna mengungkap pola umum dan interkoneksi antarfaktor. Pendekatan ini mengadaptasi model analisis Miles *et al.*, (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan, disesuaikan dengan prinsip studi pustaka kualitatif.

HASIL PENELITIAN

Tabel 1 Sumber Data Jurnal Nasional Yang Relevan

No	Judul	Jurnal, Penulis & Tahun	Hasil Penelitian
1.	<i>A Policy Implementation Review of the Free Nutritious Meal (MBG) Program</i>	Suprpto, F. A., Praditya, E., Dewi, R. M., & Adiyoso, W. (2025). <i>JISDeP: THE JOURNAL OF INDONESIA SUSTAINABLE DEVELOPMENT PLANNING</i>	Penelitian menemukan bahwa Program MBG meskipun memiliki legitimasi politik dan anggaran besar, implementasinya pada pertengahan 2025 belum optimal karena jumlah penerima manfaat dan SPPG jauh di bawah target, kualitas layanan tidak memenuhi harapan, distribusi regional tidak merata, tidak ada prosedur operasional standar, pengawasan lemah, dan ketiadaan kerangka hukum yang mengakibatkan keracunan makanan dan ketidakpuasan luas. Dibandingkan dengan model internasional (PNAE Brasil, PM POSHAN India, Finlandia), MBG kekurangan instrumen kelembagaan untuk menghubungkan intervensi dengan perbaikan terukur dalam kesehatan anak dan pembelajaran. Untuk menjadi investasi transformatif, MBG perlu kerangka pemantauan-evaluasi kuat, pendidikan gizi terintegrasi, mekanisme akuntabilitas, dan mandat hukum jelas demi kualitas dan keadilan.
2.	Penegakan Hak Anak Atas Makanan Aman dan Sehat: Studi Keracunan Program Bergizi Ditinjau Tanggung Negara	Riyanto, O. S., & Sinaga, M. R. E. (2025). <i>JURIS HUMANITY: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia</i>	Kerangka hukum Indonesia telah menyediakan landasan normatif yang kuat bagi hak ini. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan dalam pengawasan, alokasi sumber daya, dan kapasitas teknis, yang meningkatkan risiko keracunan. Pertanggungjawaban negara dapat diuraikan secara administrasi, perdata, dan pidana, tetapi perwujudannya terhambat oleh kompleksitas birokrasi, kurangnya literasi hukum, dan akses keadilan yang terbatas. Disparitas antara jaminan hukum dan realitas implementasi menciptakan celah akuntabilitas, yang berdampak serius pada anak-anak korban dan kepercayaan publik. Diperlukan reformasi sistemik, termasuk

			peraturan pelaksana yang spesifik, peningkatan kapasitas pengawasan, dan mekanisme kompensasi yang lebih responsif, demi terwujudnya perlindungan yang komprehensif dan akuntabilitas negara yang nyata dalam Program Makan Bergizi Gratis.
3.	Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Antara <i>Legacy Project</i> dan Solusi Stunting	Aprillia, N. P., & Azzahra, M. U. D. (2025). <i>JISMA: Journal Of Information Systems And Management</i>	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa MBG tidak hanya berfungsi sebagai program untuk menangani stunting tetapi juga berfungsi <i>legacy project</i> yang memiliki kepentingan politik yang kuat. Tantangan utama yang dihadapi meliputi kurangnya standar kebersihan dapur, kemungkinan adanya pemborosan anggaran dan ketidaksiapan dalam pelaksanaan.
4.	Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Indonesia Tahun 2025	Rahmah, H. A., Anggraini, A., Nilasari, Y. P., & Salsabilla, E. P. (2025). <i>Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)</i>	Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa MBG memberikan pengaruh yang baik terhadap status gizi anak, termasuk penurunan angka stunting serta peningkatan konsentrasi dan kehadiran siswa di sekolah. Program ini juga berkontribusi dalam meringankan beban ekonomi bagi keluarga dan memberdayakan pengusaha lokal. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti distribusi makanan yang tidak merata, kekurangan fasilitas di sekolah, dan perbedaan pemahaman tentang gizi di masyarakat. Evaluasi berkala, pengembangan infrastruktur, pengawasan kualitas makanan, serta dukungan dari komunitas lokal diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program ini. Studi ini menyimpulkan bahwa MBG memiliki potensi yang signifikan dalam menciptakan generasi muda yang sehat dan berkualitas, asalkan didukung oleh pengelolaan yang baik.
5.	Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan	Qomarrullah, R., Suratni, S., Wulandari, L., & Sawir, M. (2025). <i>IJI Publication: Indonesian Journal Of Intellectual Publication</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program MBG berpotensi dalam menurunkan angka stunting dan malnutrisi pada anak sekolah, meningkatkan kehadiran siswa di kelas, serta memperbaiki capaian akademik mereka. Selain itu, program ini juga mendorong keterlibatan komunitas dalam mendukung penyediaan pangan bergizi yang berkelanjutan. Namun, terdapat tantangan dalam aspek pendanaan, ketersediaan bahan pangan lokal, serta mekanisme distribusi yang perlu diperbaiki agar program dapat berjalan optimal.
6.	Analisis Implementasi	Basit, M., & Ramadani, H. (2025). <i>Journal of</i>	Hasil kajian menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berdampak

	Program Makan Bergizi terhadap Perkembangan Ekonomi	Makan Gratis	<i>Economics Development Research</i>	pada peningkatan status gizi anak-anak, tetapi juga memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap sektor pertanian, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM), serta daya beli masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi rantai pasok lokal dan tata kelola program yang transparan agar manfaat ekonominya maksimal dan berkelanjutan.
7.	Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kesenjangan Akses Pada Sekolah Nonformal: Studi Kasus PKBM dalam Program Paket A		Achmad, I. A., Emiranti, & Basra, J. (2025). <i>INTELEKTUAL: JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN MAHASISWA DAN AKADEMISI</i>	Temuan menunjukkan bahwa di Bulukumba sempat muncul insiden paket MBG dianggap basi di SMPN 2 Bulukumba, yang memicu penolakan siswa dan penangguhan sementara. Pemerintah kabupaten kemudian memperketat pengawasan kualitas makanan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi setempat. Persepsi publik beragam: sebagian khawatir atas mutu makanan, sementara sebagian lain mengapresiasi perhatian negara terhadap gizi. Dari sisi operasional, kendala logistik, kontrol mutu pemasok lokal, dan minimnya regulasi melalui peraturan presiden menambah kompleksitas pelaksanaan program.
8.	Program Makan Bergizi Gratis: Analisis Kritis Transformasi Pendidikan Indonesia Menuju Generasi Emas 2045		Albaburrahim, Putikadyanto, A. P. A., Efendi, A. N., Alatas, M. A., Romadhon, S., & Wachidah, L. R. (2025). <i>ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa program ini secara umum dapat meningkatkan kesehatan, prestasi akademik, dan generasi emas 2045. Namun, ada berbagai tantangan pada program ini, yaitu: pendistribusian logistik di daerah terpencil. Kedua, standarisasi kesehatan yang belum terstandar dengan baik, pembiayaan yang berkelanjutan, dan perubahan perilaku masyarakat Indonesia.
9.	Policy Spillover: Analisis Jaringan Dampak Kebijakan Makan Siang Bergizi Gratis terhadap Sektor Pertanian		Dwijayanti, A. (2024). <i>Jurnal Administrasi Publik</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki efek spillover signifikan terhadap sektor pertanian, termasuk peningkatan permintaan produk lokal, penguatan pasar petani, serta dorongan terhadap praktik pertanian berkelanjutan. Namun, tantangan seperti fluktuasi harga, kebutuhan infrastruktur, dan dampak lingkungan menjadi perhatian utama. Untuk memaksimalkan manfaat, diperlukan perencanaan matang, diversifikasi pasar, serta dukungan kapasitas bagi petani.
10.	Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis dalam Tinjauan Hukum Kemasayarkatan dan Aspek Negara Berkembang		Emmanulle, K. F. V., Saputra, R. A., Wicaksono, A. S. P. Y., Wicaksana, D. P., & Kamal, U. (2025). <i>JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner</i>	Hasil pembahasan menunjukkan bahwa program ini memerlukan dasar hukum yang kuat sesuai dengan Pasal 28C dan 28H UUD 1945 sebagai jaminan hak atas pangan dan jaminan sosial. Ketiadaan instrumen hukum yang mengikat membuka peluang penyimpangan,

			termasuk praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan program. Perlindungan hukum perlu diperkuat mulai dari transparansi pengadaan, pengawasan publik, hingga aspek keselamatan dan kesehatan peserta didik. Selain itu, sanksi administratif dan hukum pidana harus diterapkan secara konsisten.
11.	Rasionalisme Dalam Kebijakan Publik: Analisis Dampak Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesejahteraan Pelajar	Khatimah, A. W. N., Kamaruddin, S. A., & Awaru, A. O. T. (2025). <i>Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan</i>	Hasil analisis menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi rasional yang tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan pelajar, namun masih dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran dan pelaksanaan teknis di lapangan dan pendekatan rasionalisme bukan hanya menjadi justifikasi teoritis, tetapi juga panduan praktis dalam mewujudkan kebijakan publik yang efektif dan berkeadilan.
12.	Kebijakan Makanan Bergizi Gratis: Analisis Ekonomi Politik dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus: SMP Negeri 4 Tanjungpinang	Nissa, A. khoirun, Candra, M., Humairoh, T., & Gusyuliandari, S. (2025). <i>Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program MBG memberikan dampak positif terhadap status gizi, partisipasi pendidikan, dan ekonomi rumah tangga masyarakat. Namun, program ini juga menghadapi tantangan fiskal dan kritik terhadap prioritas anggaran negara. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil serta perlunya kebijakan yang adaptif agar keberlanjutan dan efektivitas program dapat terjaga.
13.	Dinamika Dukungan Politik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia	Rahayu, L. F. (2025). <i>PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs</i>	Temuan menunjukkan bahwa meskipun MBG memiliki potensi besar dalam perbaikan gizi nasional, masih dibutuhkan penguatan aspek implementasi dan pengawasan yang lebih ketat. Program MBG merupakan langkah strategis dalam memperbaiki status gizi anak-anak Indonesia, namun pelaksanaannya masih jauh dari ideal. Kasus keracunan, masalah logistik, serta kendala pendanaan harus segera diatasi melalui penguatan koordinasi lintas lembaga, perbaikan manajemen rantai pasok, dan peningkatan kapasitas pengawasan oleh BGN dan pemerintah daerah. Rekomendasi untuk penguatan program mencakup Evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi dan dapur produksi, Penambahan anggaran dengan sistem pencairan yang lebih efisien, Pelibatan masyarakat dalam pemantauan kualitas makanan, Penerapan standar keamanan pangan

			yang ketat, Asuransi dan perlindungan hukum bagi penerima manfaat. Dengan perbaikan di berbagai aspek ini, MBG berpotensi menjadi program jangka panjang yang tidak hanya menurunkan angka stunting, tetapi juga membentuk generasi yang sehat dan produktif.
14.	Sentimen Analisis Makan Bergizi Gratis Menggunakan Algoritma Naive Bayes	Rahmatullah, B., Saputra, S. A., Budiono, P., & Wigandi, D. P. (2025). <i>JlfoTech: Journal Of Information Technology</i>	Proses pelatihan model dilakukan dengan menggunakan dataset yang berisi komentar dari akun youtube terkait makan bergizi gratis sejumlah 1470 data dengan komentar negatif 1403 dan komentar positif 67. Setelah memberikan label maka tahap selanjutnya secara <i>preprocessing</i> dan hasil evaluasi menunjukkan akurasi sebesar 87.35% negatif, nilai <i>recall</i> yang diperoleh adalah 56.76%, dan nilai AUC sebesar 0.527. Klasifikasi yang telah dilakukan mendapatkan hasil komentar negatif mengenai makan bergizi gratis.
15.	Dampak Makan Siang Gratis Pada Kondisi Keuangan Negara Dan Peningkatan Mutu Pendidikan	Septiani, F. I., Rosiana, N., & Azzahra, A. (2024). <i>JUPENSAL: Jurnal Pendidikan Universal</i>	Program makan siang gratis tergolong kebijakan sosial. Sedangkan kebijakan sosial dalam ilmu ekonomi biasa disebut dengan kebijakan "robin hood". Melihat kondisi tersebut, pemerintah perlu menyusun rencana, anggaran, dan program yang komprehensif dan terstruktur bagi calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah menargetkan defisit sebesar 2,45% hingga 2,8% pada tahun 2025. Di atas target awal tahun 2024 sebesar 2,29%. Salah satu fokus pada program makan siang gratis ini adalah untuk meningkatkan standar gizi anak-anak yang tinggal di daerah terpencil. Tujuannya adalah untuk secara efektif mengurangi kesenjangan dan mendorong alokasi sumber daya ekonomi yang lebih adil.
16.	Tinjauan Kritis Tentang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Produktivitas Belajar Siswa	Tambunan, K. A. H., Nababan, R., Siagian, R. A., Naiborhu, R., Harianti, S., & Jamaludin. (2025). <i>Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika</i>	Program Makan Bergizi Gratis di SMK Negeri 6 Medan adalah uji coba kebijakan pemerintah untuk menyediakan makanan sehat kepada siswa. Itu berlangsung selama 24 hari dan dilakukan dalam dua sesi, masing-masing sesuai dengan jadwal sekolah. Program ini meningkatkan kehadiran siswa dan membantu mereka makan dengan baik, terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga yang tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup. Meskipun demikian, dampak terhadap hasil belajar masih memerlukan evaluasi dalam jangka panjang. Pendistribusian makanan,

			pengelolaan sampah, dan kualitas makanan adalah beberapa tantangan dalam implementasi. Dukungan dari guru, OSIS, dan pihak sekolah membantu program berjalan dengan lancar. Untuk memastikan program ini berhasil dan berkelanjutan di masa mendatang, evaluasi dan peningkatan sistem diperlukan.
17.	KEBIJAKAN MAKANAN BERGIZI GRATIS: TINJAUAN EKONOMI POLITIK DALAM KESEJAHTERAAN DAN KETAHANAN PANGAN	Waluyo, S. D. (2025). <i>Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara</i>	Dari perspektif ekonomi politik, kebijakan ini mencerminkan peran negara dalam redistribusi sumber daya, intervensi pasar, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari dinamika politik, termasuk kepentingan aktor-aktor negara dan non-negara, serta tantangan anggaran dan efektivitas pelaksanaannya. Secara ekonomi, kebijakan ini berpotensi mendorong peningkatan produktivitas jangka panjang, tetapi juga memunculkan tantangan dalam pembiayaan dan keberlanjutan fiskal. Artikel ini menganalisis kebijakan makan bergizi gratis dalam konteks ekonomi politik, dengan menyoroti dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Hasil kajian terhadap tujuh belas artikel jurnal dari dua puluh artikel jurnal menunjukkan bahwa program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diadakan sebagai upaya negara untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan makanan sehat. Makanan sehat yang diberikan harus menunjang tumbuh kembang dan kegiatan belajar anak. Dalam praktiknya, program ini membawa banyak manfaat meskipun tetap dihadapkan pada berbagai tantangan nyata di lapangan. Studi penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG belum sepenuhnya berjalan ideal. Tantangannya cukup kompleks, mulai dari pengawasan makanan hingga koordinasi antar instansi. Seperti dalam salah satu kajian menyebutkan bahwa MBG menghadapi tantangan terkait keamanan pangan, logistik, dan koherensi regulasi sehingga kualitas makanan tidak selalu merata di semua daerah (Suprpto *et al.*, 2025). Penelitian lain juga menyoroti masih adanya celah dalam pengawasan, alokasi sumber daya, dan kapasitas teknis yang berpotensi meningkatkan risiko seperti kasus keracunan pada peserta didik (Riyanto & Sinaga, 2025). Studi implementasi lokal menemukan bahwa faktor manajemen, distribusi dana, dan efektivitas komunikasi kebijakan juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan MBG (Aprillia & Azzahra, 2025).

Terlepas dari tantangan implementasi MBG, beberapa studi literatur berpendapat bahwa dampak MBG terhadap anak sangat signifikan. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa program MBG berpotensi menurunkan angka stunting dan malnutrisi pada anak sekolah (Qomarrullah *et al.*, 2025). Ditemukan pula bahwa kehadiran siswa di sekolah meningkat dan suasana belajar menjadi lebih kondusif ketika anak-anak datang dengan kondisi kenyang dan bugar. Banyak guru juga melaporkan bahwa anak jadi lebih fokus dalam mengikuti pelajaran (Rahmah *et al.*, 2025).

Program MBG tidak hanya berdampak bagi anak, tetapi juga bagi Masyarakat sekitar. Studi literatur yang ditemukan menunjukkan bahwa MBG mampu memberikan

efek berganda bagi ekonomi daerah. Salah satu studi literatur menyatakan bahwa program MBG memberikan efek berganda (*Multiplier Effect*) terhadap sektor pertanian, UMKM, serta daya beli masyarakat (Basit & Ramadani, 2025). Ketika pemerintah membeli bahan makanan dari pedagang dan petani lokal, dampak positifnya dapat dirasakan oleh berbagai pihak seperti pemasok, pengolah makanan hingga sektor transportasi. Program MBG ini memiliki banyak manfaatnya, namun implementasi MBG bernuansa kompleks dan tidak sepenuhnya berjalan mulus seperti keamanan makanan dan kualitas proses memasak. Beberapa daerah bahkan mengalami insiden keracunan yang menurut beberapa penelitian hal ini terjadi karena lemahnya standar keamanan pangan dan kurangnya monitoring (Riyanto & Sinaga, 2025). Sehingga sistem akuntabilitas yang belum kuat serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal juga menjadi catatan penting dalam evaluasi kebijakan.

PEMBAHASAN

Temuan dari dua puluh artikel jurnal yang dianalisis menjelaskan bahwa program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya dirancang untuk menjawab persoalan yang bersifat kompleks dan saling berkaitan. Masalah kompleks tersebut dimulai dari masalah gizi anak, kualitas pendidikan, hingga ketimpangan sosial. Berdasarkan hasil kajian berbagai jurnal, MBG tidak dapat dipahami hanya sebagai program penyediaan makanan, melainkan sebagai kebijakan publik yang menuntut keterlibatan banyak sektor. Ditemukan pula keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh tata kelola kebijakan yang baik, kesiapan lembaga pelaksana, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dilakukan agar program dapat berjalan secara berkelanjutan dan merata (Emmanulle *et al.*, 2025). Studi literatur yang ditemukan sebagian besar menjelaskan manfaat dari MBG, namun tidak sedikit pula yang menjelaskan dampak negatif atau permasalahan implementatif. Dampak negatif atau permasalahan implementatif yang ditemukan seperti ketidaksiapan sistem dan kelembagaan dalam menjalankan program berskala nasional. Studi literatur menjelaskan bahwa kebijakan yang diluncurkan secara cepat seringkali tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur distribusi, serta mekanisme pengawasan memadai. Dengan kondisi seperti ini bisa berpotensi menurunkan efektivitas program dan menimbulkan ketimpangan pelaksanaan antar wilayah (Dwijayanti, 2024).

Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh sejumlah penelitian menegaskan bahwa pelaksanaan MBG di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan kapasitas antar daerah, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor seringkali mempengaruhi kualitas pelaksanaan program (Rahayu, 2025). Akibatnya, implementasi MBG menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar wilayah, baik dari segi distribusi, kualitas makanan, maupun pengawasan program. Pada studi literatur ditemukan bahwa keterbatasan anggaran dan tekanan efisiensi seringkali berdampak pada penurunan kualitas bahan pangan, variasi menu yang minim, serta kurangnya pengawasan terhadap keamanan pangan (Achmad *et al.*, 2025). Hal ini berpotensi menimbulkan risiko kesehatan terutama apabila makanan tidak di proses sesuai standar higienitas.

Program MBG memberikan dampak positif terhadap pendidikan, terutama pada proses pembelajaran. Pemberian makanan bergizi secara rutin terbukti meningkatkan konsentrasi belajar dan kehadiran siswa di sekolah. Dalam salah satu penelitian dibuktikan bahwa siswa yang memperoleh asupan gizi memadai cenderung lebih fokus dan memiliki motivasi belajar lebih baik dibandingkan dengan siswa yang tidak mendapatkan dukungan serupa (Septiani *et al.*, 2024). Hal ini menegaskan bahwa MBG memiliki kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Ketergantungan siswa terhadap program MBG apabila tidak disertai edukasi gizi yang memadai dapat mengurangi peran keluarga dalam membangun kebiasaan makan sehat di rumah. Kondisi ini menegaskan bahwa MBG perlu diintegrasikan dengan program edukasi

dan pemberdayaan keluarga. Integrasi tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan ketergantungan jangka panjang. Selain berdampak pada pendidikan, MBG juga memiliki implikasi penting bagi kesehatan masyarakat. Penelitian yang ditemukan menempatkan MBG sebagai bentuk intervensi preventif yang efektif dalam mengurangi risiko malnutrisi dan stunting pada anak usia sekolah. Program ini dinilai mampu melengkapi upaya kesehatan yang selama ini lebih terfokus pada layanan pengobatan dengan memberikan perhatian pada pemenuhan gizi sejak dini (Albaburrahim *et al.*, 2025).

Pendekatan transdisipliner menjadi sangat relevan dalam pelaksanaan MBG karena program ini bersinggungan langsung dengan berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Dalam studi literatur ditemukan bahwa keterlibatan petani lokal, UMKM, dan pelaku usaha pangan dalam penyediaan bahan makanan MBG tidak hanya mendukung kualitas gizi, tetapi mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar (Tambunan *et al.*, 2025). Keterlibatan tersebut menjadikan MBG berpotensi menciptakan manfaat ganda, baik bagi penerima program maupun bagi komunitas lokal. Perspektif ekonomi lokal menjelaskan meskipun MBG menjadi potensi penggerak UMKM dan petani, beberapa studi literatur mengungkapkan bahwa adanya kecenderungan sebaliknya. Dalam praktik tertentu pengadaan bahan makanan MBG masih di dominasi oleh penyedia besar, sehingga pelaku usaha kecil dan petani lokal kurang terlibat secara optimal (Waluyo, 2025). Kondisi ini menimbulkan kritik bahwa MBG berisiko memperkuat ketimpangan ekonomi apabila tidak disertai kebijakan afirmatif yang jelas bagi ekonomi lokal.

Aspek sosial dan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan MBG. Studi literatur menemukan bahwa dukungan masyarakat cenderung meningkat ketika program dijalankan secara transparan dan melibatkan orangtua serta komunitas sekolah. Sebaliknya, kurangnya informasi dan sosialisasi seringkali menimbulkan keraguan masyarakat terhadap kualitas makanan ataupun ketepatan sasaran program (Nissa *et al.*, 2025). Respons publik terhadap MBG juga tercermin dalam berbagai kajian analisis sentimen. Penelitian berbasis analisis data menunjukkan bahwa persepsi positif masyarakat terhadap MBG umumnya muncul ketika manfaat program dirasakan secara langsung. Manfaat program MBG yang bisa dirasakan secara langsung seperti berkurangnya beban ekonomi keluarga dan meningkatnya kesehatan anak. Faktanya masih ditemukan sentimen negatif yang berkaitan dengan isu transparansi anggaran dan konsistensi pelaksanaan program di lapangan (Rahmatullah *et al.*, 2025). Lemahnya sistem akuntabilitas dan pengawasan membuka peluang terjadinya inefisiensi bahkan penyimpangan dalam proses pengadaan dan distribusi makanan (Tambunan *et al.*, 2025).

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, MBG juga memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan tanpa kelaparan dan pendidikan berkualitas. Studi literatur menemukan bahwa integrasi MBG ke dalam kebijakan pendidikan dan sosial berpotensi memperkuat pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang. Potensi tersebut akan dirasakan masyarakat selama program ini dilaksanakan secara konsisten dan di evaluasi secara berkelanjutan (Waluyo, 2025). Implikasi kebijakan yang disarankan dalam mengatasi tantangan implementasi MBG tidak hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan, melainkan juga dengan cara pemerintah merancang, mengoordinasikan, dan mengevaluasi program ini secara menyeluruh.

Pertama, dalam sisi tata kelola MBG harus menuntut pola kerja lintas sektor yang lebih terintegrasi. Pendekatan transdisipliner menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi tidak cukup dilakukan secara administratif atau bersifat *ad hoc*. Diperlukan mekanisme kerjasama yang lebih permanen dan jelas, dimana sektor pendidikan, kesehatan, pangan, dan pemerintah daerah dapat berbagi peran dan tanggungjawab secara seimbang. Dengan koordinasi yang kuat, potensi tumpang tindih kebijakan dan lemahnya pengawasan dapat diminimalisir. Kedua, dalam pelaksanaan di daerah MBG perlu merancang fleksibilitas agar sesuai dengan kondisi lokal. Pendekatan transdisipliner

menekankan pentingnya pemahaman konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Pemerintah daerah perlu diberikan ruang untuk inovasi, misalnya dengan memanfaatkan bahan pangan lokal atau melibatkan komunitas setempat tanpa mengabaikan standar gizi dan keamanan pangan yang telah ditetapkan secara nasional.

Ketiga, dalam dimensi ekonomi, MBG memiliki potensi besar untuk mendorong ekonomi lokal, namun hal tersebut hanya akan terwujud jika didukung oleh kebijakan yang tepat. Pendekatan transdisipliner menunjukkan perlunya sinergi antara kebijakan pangan, pertanian, dan UMKM. Pemerintah perlu memastikan bahwa rantai pasok MBG memberi ruang yang adil bagi petani dan pelaku usaha kecil, sehingga manfaat program ini tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan namun juga oleh masyarakat sekitar. Keempat, dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, pendekatan transdisipliner menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam pengawasan program. Implikasi kebijakan ini terlihat pada perlunya membuka ruang partisipasi bagi masyarakat, sekolah, dan akademisi dalam proses monitoring dan evaluasi. Dukungan teknologi informasi dan keterbukaan data dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik serta mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Kelima, dalam sudut pandang pendidikan dan kesehatan, MBG seharusnya tidak berdiri sendiri sebagai program bantuan melainkan terintegrasi dengan edukasi gizi, layanan kesehatan sekolah, serta penguatan peran keluarga. Dengan hal ini, MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi jangka pendek, tetapi juga membantu membentuk kebiasaan hidup sehat yang berkelanjutan bagi anak dan keluarga. Keenam, dalam hal evaluasi, pendekatan transdisipliner mendorong penggunaan indikator keberhasilan yang lebih luas dan bermakna. Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang terserap. Dampak terhadap kesehatan anak, kualitas pembelajaran, dan penguatan ekonomi lokal juga menjadi indikator keberhasilan pendukung. Dengan evaluasi yang komprehensif, perbaikan kebijakan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis bukti.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan di atas dapat dipahami bahwa program Makanan Bergizi Gratis (MBG) hanya dapat berjalan optimal apabila dirancang dan dilaksanakan dengan pendekatan transdisipliner. Pendekatan ini memungkinkan integrasi berbagai perspektif dan kepentingan, sehingga MBG tidak hanya dipandang sebagai program bantuan pangan, tetapi juga sebagai strategi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan adanya berbagai tantangan dalam implementasi MBG, maka ditekankan pentingnya kolaborasi lintas disiplin dan lintas aktor. Kolaborasi ini melibatkan akademisi, praktisi kesehatan, pendidik, ekonom, dan masyarakat sipil dalam merancang mekanisme evaluasi dan perbaikan program secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan cerdas yang bisa mengatasi stunting, membantu peserta didik lebih fokus belajar, mendorong ekonomi lokal lewat UMKM serta petani. Program MBG mengalami tantangan lumayan berat seperti minimnya koordinasi antar lembaga, infrastruktur kurang memadai, dan risiko makanan kurang baik. Implementasi MBG mengalami variasi antar daerah karena kapasitas lokal tidak merata, anggaran ketat juga membuat kualitas makanan menjadi turun serta transparansi kurang yang membuat masyarakat curiga. Dampak positifnya anak-anak yang mendapat program MBG menjadi lebih rajin ke sekolah dan sehat. Manfaatnya bisa pudar seiring waktu jika terlalu bergantung tanpa edukasi di rumah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi dan mengevaluasi dampak program Makanan Bergizi Gratis (MBG) terhadap status gizi, kehadiran siswa, konsentrasi belajar, serta merekomendasikan solusi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Penelitian ini masih perlu eksplorasi mendalam mengenai dampak MBG terhadap perilaku konsumsi rumah tangga jangka panjang, efektivitas integrasi dengan kurikulum

pendidikan gizi di sekolah, evaluasi biaya-manfaat ekonomi secara longitudinal, serta pengaruh perubahan iklim terhadap rantai pasok pangan lokal untuk program berskala nasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Achmad, I. A., Emiranti, & Basra, J. (2025). Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dan Kesenjangan Akses Pada Sekolah Nonformal: Studi Kasus PKBM Dalam Program Paket A. *INTELEKTUAL:JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN MAHASISWA DAN AKADEMISI*, 1(4), 24–32.
2. Albaburrahim, Putikadyanto, A. P. A., Efendi, A. N., Alatas, M. A., Romadhon, S., & Wachidah, L. R. (2025). Program Makan Bergizi Gratis: Analisis Kritis Transformasi Pendidikan Indonesia Menuju Generasi Emas 2045. *ENTITA:Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(1), 767–780.
3. Aprillia, N. P., & Azzahra, M. U. D. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Antara Legacy Project dan Solusi Stunting. *JISMA: Journal Of Information Systems And Management*, 4(5), 19–22.
4. Badan Gizi Nasional Indonesia. (2025). *Manfaat Program MBG Menekan Angka Stunting RI yang Masih Tinggi*.
5. Basit, M., & Ramadani, H. (2025). Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Perkembangan Ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 1(2), 49–54.
6. Dwijayanti, A. (2024). Policy Spillover: Analisis Jaringan Dampak Kebijakan Makan Siang Bergizi Gratis terhadap Sektor Pertanian. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(1), 281–308.
7. Emmanulle, K. F. V., Saputra, R. A., Wicaksono, A. S. P. Y., Wicaksana, D. P., & Kamal, U. (2025). Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis dalam Tinjauan Hukum Kemasyarakatan dan Aspek Negara Berkembang. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(4), 1329–1342.
8. Khatimah, A. W. N., Kamaruddin, S. A., & Awaru, A. O. T. (2025). Rasionalisme Dalam Kebijakan Publik: Analisis Dampak Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesejahteraan Pelajar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 1969–1976.
9. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
10. Nissa, A. khoirun, Candra, M., Humairoh, T., & Gusyuliandari, S. (2025). Kebijakan Makanan Bergizi Gratis: Analisis Ekonomi Politik dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus: SMP Negeri 4 Tanjungpinang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11), 33–37.
11. Qomarrullah, R., Suratni, S., Wulandari, L., & Sawir, M. (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan. *IJI Publication: Indonesian Journal Of Intellectual Publication*, 5(2), 130–137.
12. Rahayu, L. F. (2025). Dinamika Dukungan Politik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(2), 815–831.
13. Rahmah, H. A., Anggraini, A., Nilasari, Y. P., & Salsabilla, E. P. (2025). ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI SEKOLAH DASAR INDONESIA TAHUN 2025. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2(2), 2855–2866.
14. Rahmatullah, B., Saputra, S. A., Budiono, P., & Wigandi, D. P. (2025). Sentimen Analisis Makan Bergizi Gratis Menggunakan Algoritma Naive Bayes. *JlfoTech: Journal Of Information Technology*, 5(1), 259–264.
15. Riyanto, O. S., & Sinaga, M. R. E. (2025). PENEGAKAN HAK ANAK ATAS MAKANAN AMAN DAN SEHAT: STUDI KASUS KERACUNAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI

- GRATIS DITINJAU DARI TANGGUNG JAWAB NEGARA. *JURIS HUMANITY: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(1), 1–11.
16. Septiani, F. I., Rosiana, N., & Azzahra, A. (2024). Dampak Makan Siang Gratis Pada Kondisi Keuangan Negara Dan Peningkatan Mutu Pendidikan. *JUPENSAL: Jurnal Pendidikan Universal*, 1(2), 192–196.
 17. Suprpto, F. A., Praditya, E., Dewi, R. M., & Adiyoso, W. (2025). A Policy Implementation Review of the Free Nutritious Meal (MBG) Program. *JISDeP: THE JOURNAL OF INDONESIA SUSTAINABLE DEVELOPMENT PLANNING*, 6(2), 297–312.
 18. Tambunan, K. A. H., Nababan, R., Siagian, R. A., Naiborhu, R., Harianti, S., & Jamaludin. (2025). Tinjauan Kritis Tentang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Produktivitas Belajar Siswa. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika*, 2(2), 21–31.
 19. Waluyo, S. D. (2025). Kebijakan Makanan Bergizi Gratis: Tinjauan Ekonomi Politik Dalam Kesejahteraan Dan Ketahanan Pangan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 144–151.

PROFIL SINGKAT

Harien Fidelya Ardhana adalah mahasiswa program studi pendidikan ips, fakultas ilmu sosial dan hukum, Universitas Negeri Jakarta. Selain itu ia aktif dalam Badan Eksekutif Mahasiswa di tingkat prodi serta di Desa Pendidikan yang merupakan organisasi pengabdian pengajaran di Tingkat fakultas.

Rini Riris Setyowati adalah dosen program studi Pendidikan Ips, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta.

Sujarwo adalah dosen program studi Pendidikan Ips, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta.

Desy Safitri Adalah kepala prodi dan dosen program studi Pendidikan Ips, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta.